

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pergolakan rakyat di Libya yang menuntut mundurnya Khadafi dari kursi presiden, mendapatkan reaksi dari Khadafi berupa kekerasan serta penggunaan senjata militer dan jet tempur. Dalam peristiwa ini banyak korban berjatuhan, tercatat sekitar ratusan rakyat sipil meninggal dunia. Perbuatan Khadafi ini bisa disebut dengan kejahatan manusia dan pembantaian terhadap warganya.

Libya dibawah kepemimpinan Khadafi selama 42 tahun menjadi Negara yang otoriter. Amerika ingin menyebarkan nilai-nilai demokrasi seperti penegakan HAM, pasar terbuka, dan pembagian kekuasaan yang jelas. Sehingga Libya bisa menjadi partner sebenarnya bagi Amerika dan Negara demokrasi lainnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Negara demokrasi cenderung lebih damai dibandingkan Negara non-demokrasi dan Negara demokrasi tidak akan menyerang Negara demokrasi lainnya.

Konflik di Libya terjadi karena terimbas aksi para pemberontak di Timur Tengah (*Arab's Spring*). Konflik ini terjadi antar 2 kubu, kubu oposisi dan kubu pemerintah. Berawal dari para oposisi/pemberontak melakukan aksi demonstrasi kepada Muammar Khadafi yaitu pemimpin Libya yang di anggap sebagai pemimpin otoriter. . Peristiwa ini berawal pada tanggal 15 february 2011, 4 hari setelah berhasil di gulingkannya presiden Mesir Husni Mubarak, revolusi Arabia bergerak menuju kota terbesar kedua Libya, Benghazi. Sekitar 200 demonstran melakukan aksinya di depan markas polisi di Benghazi. Agenda protesnya adalah meminta pertanggungjawaban atas penangkapan seorang aktivis HAM Fathi Terbil yang turun ke jalan di kota pesisir Benghazi. Sebuah sumber yang ditempatkan sangat dekat dengan pemerintah Libya mengatakan kepada CNN, "Tidak ada yang serius di sini. Ini hanya orang-orang muda berkelahi satu sama lain." . Para massa demonstran terdiri dari pengacara dan oposisi.

Pada tanggal 18-19 Februari 2011 terjadi pertempuran antara demonstran dan loyalis Khadafi sehingga Benghazi jatuh ke tangan oposisi. Namun, Korban

jiwa mencapai 300 demonstran dan 120 anggota pasukan pemerintah. (Tamburaka 2011, hlm.228) Hal itu berawal ketika loyalis rezim Khadafi menyebrang ke pihak oposisi yang memiliki pasukan lengkap dengan senapan mesin, truk, senjata anti-pesawat yang kemudian menjadi milik oposisi. Konflik terus terjadi sejak tanggal 19 Februari 2011. Hal ini lah yang membuat rakyat Libya melakukan persatuan dalam menjatuhkan rezim Khadafi. Berbeda dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah yang di mana pemimpin tersebut tidak menolak untuk di jatuhkan, Khadafi memberikan respon kepada para pemberontak dengan melakukan gencatan senjata dan menggunakan militer. Pada akhirnya terjadi kerisuhan di berbagai wilayah Libya, salah satu wilayah yang paling parah terkena imbasnya adalah Tripoli.

Konflik yang terjadi di Libya ini pada awalnya merupakan konflik internal. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik ini meluas menjadi isu internasional. Karena semakin parahnya konflik tersebut dan angka korban jiwa semakin banyak, menyebabkan dunia Internasional mengutuk kejadian ini. Hari ke hari konflik di Libya tidak dapat lagi di pisahkan. Khadafi semakin gencar melakukan tindakan militernya sedangkan pihak oposisi tidak ingin begitu saja mengalah. Karena semakin parahnya konflik ini, muncul berbagai komentar dari pihak Internasional terutama dari pihak PBB. PBB mengecam tindakan Khadafi yang tidak mau mengalah. Selain PBB, Negara lain seperti Perancis juga mengecam tindakan ini. Menurut Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Muammar Khadafi secepatnya harus di turunkan. Jika tidak rakyat Libya selamanya tidak akan hidup tenang.

Pada tanggal 17 maret 2011, PBB mengeluarkan resolusi DKPBB 1973 yang bertujuan untuk menghentikan tindakan Khadafi yang semakin tidak manusiawi. Salah satu resolusi DKPBB 1973 yaitu *no-fly zone* atau zona larang terbang yang di jalankan pada tanggal 19 maret 2011 oleh anggota PBB salah satunya adalah Perancis. Dalam hal ini pihak PBB menunjuk Inggris dan Perancis sebagai ketua dalam misi ini. Perancis merupakan salah satu pihak barat yang memulai serangan terhadap pro-Khadafi. Keterlibatan Perancis dalam konflik yang terjadi di Libya di mulai sejak maret 2011 bertepatan setelah di berlakukannya zona larang terbang (*no-fly zone*) oleh Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap Libya. Pada bulan februari sebelumnya, presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mendorong Uni Eropa untuk segera memberi tindakan dan sanksi terhadap Khadafi dan menuntut dia agar menghentikan serangan terhadap warga sipil. Hal ini diikuti dengan pernyataan Presiden Perancis saat itu Nicolas Sarkozy dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Paris (*Summit Paris*) untuk membahas situasi di Libya setelah penetapan resolusi PBB 1973 dan dihadiri oleh beberapa elit penting dari berbagai Negara Dan merupakan satu-satunya pihak barat yang sangat gigih dalam melakukan intervensi militer di Libya. Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penggunaan militer terhadap warga sipil di Libya dan pada 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat sepakat untuk merujuk situasi yang sedang berlangsung di Libya untuk Mahkamah Pidana Internasional, memberlakukan embargo pada Libya Arab Jamahiriya, termasuk penyediaan personil tentara bayaran dan membekukan aset keuangan Muammar Khadafi

Pada tanggal 27 Februari 2011 badan pengungsi PBB mengatakan hampir 100.000 orang telah melarikan diri ke negara tetangga Libya yaitu Mesir dan Tunisia dalam seminggu terakhir, untuk menghindari pemberontakan anti-pemerintah yang mematikan. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Antonio Guterres meminta Kemudian muncul pertanyaan bagi penulis sebagaimana terlampir di rumusan permasalahan, apa kepentingan Perancis di Libya? berdasarkan penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa kepentingan Perancis meliputi kepentingan ekonomi, politik serta sosial. Dari kepentingan ekonomi Libya merupakan Negara terbesar keempat produsen minyak di Afrika dan Negara pengekspor minyak urutan ke-12 terbesar di dunia. Libya bahkan mampu menghasilkan minyak sebanyak 1,8 juta barel per hari dan tercatat sebagai Negara pemasok kebutuhan minyak dunia sebesar 2,1 persen dari total kebutuhan minyak dunia. Kepentingan politik. terdapat peristiwa memalukan yang di alami Perancis pada masa Negara tersebut melakukan intervensi di Tunisia. Hal itu menimbulkan reaksi yang sangat negatif oleh dunia internasional terhadap penanganan Perancis dalam revolusi di Tunisia. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi presiden Perancis Nicolas Sarkozy dalam perannya di isu internasional pada masa mendatang.

Melalui aksi intervensi militer Perancis dalam menaklukan rezim Khadafi di Libya ini menjadi wadah untuk Perancis mengembalikan harga dirinya oleh dunia internasional. Sekaligus hal ini dapat membuktikan bahwa Perancis selalu mengedepankan independensi dalam melaksanakan politik luar negerinya. Lalu kepentingan sosial, Perancis yang mengidentitaskan dirinya sebagai pelindung HAM, membuat Perancis merasa patut untuk turun tangan selama terjadinya Arab spring. Selama Arab spring, Libya telah melanggar HAM. Dalam hal pelanggaran ini, Sarkozy menyatakan bahwa revolusi ini telah menghasilkan harapan besar dalam hati dari semua orang yang berbagi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam aksi intervensi militer di Libya tidak terlepas dengan adanya hambatan yang terjadi, hambatan tersebut adalah Cina dan Rusia Menolak Intervensi Libya di DK PBB.

Cina memiliki prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain negara. Oleh karena itu, China enggan untuk setiap tindakan otorisasi penggunaan kekuatan terhadap negara yang berdaulat. China juga memiliki beberapa hubungan ekonomi dan politik dengan rezim Kolonel Khadafi. Sehingga Cina memilih abstain dan tidak memilih pada resolusi 1970 dan resolusi 1973, yang memungkinkan sanksi dan aksi militer. Banyak yang berpendapat bahwa abstainnya Cina karena Cina memiliki hubungan yang baik dengan rezim Khadafi. Tetapi bagi pemerintah Cina tidak memiliki kepentingan dalam melindungi pemerintah Libya. Ketika konflik Libya mulai, Cina memiliki 18 miliar USD penawaran dengan Libya dan lebih dari 35.000 warganya yang tinggal di Libya. Cina juga mendapatkan ekspor minyak mentah dari Libya, bakhannya pada 2008-2011 jumlah eksport minyak Libya menjadi dua kali lipat dari biasanya. Dua hal ini lah yang membuat Cina tidak mendukung inervensi terhadap Libya. Singkat kata, Dalam perang saudara yang terjadi di Libya, Perancis dapat menemukan alasan yang lebih kuat untuk mengikut sertakan pasukannya. Libya menjadi isu yang lebih penting bagi Perancis dibandingkan dengan kasus Irak dan Afganistan yang digagas oleh Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme karena dalam konflik dan krisis politik yang terjadi di Libya Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Perancis untuk mengikut sertakan pasukannya di Libya diantaranya

adanya indikasi kepemilikan dan penggunaan senjata kimia oleh Khadafi, penghilangan penggunaan kekuatan udara terhadap warga sipil, dan dalam rangka menjamin rakyat Libya untuk tetap mendapatkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh Khadafi. Aksi intervensi ini pun tidak terjadi begitu saja, Perancis sebelumnya telah mempertimbangkan berbagai opsi yang ada untuk mendorong agar pemerintah Khadafi dapat mengakhiri konflik tanpa harus ada campur tangan dari negara lain dan NATO, namun karena opsi-opsi lain yang telah diusahakan tidak menuai hasil yang baik, sehingga aksi kekuatan militer menjadi sah dan perlu untuk dilakukan.

IV.2 Saran

Konflik di Libya pada awalnya hanya protes agar Khadafi turun dari jabatannya. Seperti halnya di Tunisia. Namun, Moammar Khadafi enggan meletakkan jabatannya dan justru menyerang demonstran anti-Pemerintah dengan senjata. Diawali dengan maraknya protes di berbagai kota di Libya, konflik di Libya terjadi pada pertengahan Februari tahun 2011 tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011, dan mengarah pada konflik bersenjata.

Dengan banyaknya korban jiwa atas konflik di Libya. Dalam menanggapi protes dari rakyatnya, Khadafi menggunakan cara-cara kekerasan sampai penggunaan senjata dengan kekuatan militer dan jet tempur. Sehingga rakyat sipil Libya yang menjadi korban dalam gelombang aksi protes turunnyanya Khadafi. Secara resmi tercatat jumlah korban tewas dalam gelombang protes anti-pemerintah di Libya mencapai 300 orang, termasuk 111 tentara dan 189 warga sipil. Korban berjatuhan menyusul bentrokan yang meletus pada pekan silam. Peristiwa ini mengundang reaksi dari dunia internasional. Banyak negara mengecam tindakan kekerasan Khadafi kepada rakyatnya. Melihat banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban dalam konflik antara oposan Khadafi dan loyalis membuat dunia internasional memberi perhatian terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan. Dewan Keamanan melakukan sidang dua kali terkait konflik di Libya. Sidang pertama menghasilkan Resolusi DK PBB No.S/RES/1970. Namun, resolusi ini tidak dilaksanakan oleh Khadafi. Khadafi

tetap menggempur pihak oposisi dengan senjata militernya, termasuk serangan melalui udara.

Selanjutnya, negara-negara barat di bawah naungan PBB terutama Perancis begitu gigih mendesak agar PBB segera melakukan sidang kedua. Dalam sidang kedua dihasilkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 pada tanggal 17 Maret 2011. Resolusi ini dikeluarkan untuk mencegah pelanggaran HAM di Libya terus berlanjut. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 tersebut mengatur mengenai penerapan gencatan senjata (cease-fire); perlindungan atas penduduk sipil (protect of civilians); pelaksanaan Zone larangan terbang (No Fly Zone); pelaksanaan Embargo senjata (Enforcement of the arms Embargo); dan pembekuan sejumlah aset perorangan, instansi pemerintah maupun perusahaan Libya. Tercatat bahwa serangan dari Negara di bawah naungan PBB menimbulkan korban rakyat dan sipil lebih banyak dua kali lipat daripada sebelumnya. Terlebih setelah NATO turut menyelesaikan permasalahan di Libya dan penggunaan militernya secara tidak stabil. Tanpa di ketahui bahwa hal ini berdampak buruk oleh rakyat sipil Libya. Bukan hanya pasukan pro Khadafi saja yang memakan korban jiwa, namun para oposisi dan rakyat lebih memakan korban jiwa. Memang, penggunaan Intervensi Militer di Libya banyak mengandung pro kontra. Hal ini membuat konflik di Libya menjadi lebih buruh daripada sebelumnya. Walaupun kemenangan berada di pihak NATO, tetapi dampak setelah terjadinya intervensi militer di Libya sangat mengerikan.

Dalam pelaksanaan intervensi militer dalam rangka intervensi humanitarian, perlu adanya pengawasan dari pihak yang berkaitan dengan hal ini. Langkah ini dapat ditempuh dengan dibentuknya tim atau komisi oleh untuk mengawasi jalannya intervensi militer. PBB memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan pembentukan komisi pengawasan untuk mengawasi intervensi militer karena PBB sebagai komunitas internasional utama dan terbesar yang juga berwenang memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi militer.

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dan laporan selama berjalannya operasi militer tidak simpang siur. Statistik seperti jumlah pasti korban dan target akan lebih transparan. Bahkan bila jatuh korban dari pihak sipil, jumlah pastinya akan lebih gampang diketahui. Selama ini kita bisa melihat bahwa dalam sebuah

intervensi militer, tim pencari fakta turun setelah operasi militer selesai dan untuk memastikan jumlah korban saja akan sangat susah. Belum lagi bila tim tersebut mencari jumlah pasti korban dari pihak sipil. Hanya mengandalkan data dari wawancara penduduk yang kebenarannya tidak dapat dipastikan secara penuh.

Namun dalam pengawasan operasi militer seperti ini, PBB harus bekerjasama penuh dari negara-negara atau komunitas internasional yang melakukan operasi militer. Tim pengawasan harus selalu melaporkan pergerakan mereka dan sebaliknya, pusat komando operasi militer harus selalu mengaktualisasi operasi mereka kepada tim pengawasan di darat. Hal ini dimaksudkan agar tim pengawasan PBB di darat tidak turut menjadi korban bila misalnya dilakukan operasi penyerangan melalui udara. Selain itu, dengan adanya tim pengawasan di darat, kemungkinan jatuhnya korban dari pihak sipil dapat dikurangi atau dicegah dengan adanya laporan berkala dari tim pengawasan di darat, apabila mereka berada di dekat wilayah target dan mengetahui secara pasti adanya warga sipil yang terancam dengan serangan di wilayah tersebut. Mereka juga bisa membantu mengevakuasi warga sipil sebelum serangan dilancarkan ke wilayah tersebut. Hal ini juga akan sangat membantu karena intervensi militer di masa kini sangat mengandalkan operasi udara karena mencegah jatuhnya banyak korban dari pihak yang mengintervensi, sehingga meninggalkan celah yaitu data intelijen di darat yang kurang akurat.

Perlu dicatat bahwa sampai saat ini, intervensi militer dalam rangka intervensi humanitarian belum memiliki konsensus ataupun pijakan hukum internasional. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu pro dan kontra mengenai pelaksanaan intervensi militer. Akan tetapi, melihat intervensi militer dalam rangka intervensi humanitarian NATO di Libya yang bisa dikatakan berhasil karena dapat menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis politik di negara tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah saatnya dibentuk suatu konsensus atau pijakan hukum internasional bagi pelaksanaan intervensi militer. Dalam konsensus ini dapat dicantumkan kapan dan bagaimana sebuah intervensi militer itu dapat dilakukan sehingga tidak perlu lagi terjadi perdebatan panjang apakah intervensi militer sudah bisa dilaksanakan atau tidak, dan juga mengenai pelaksanaannya di lapangan. PBB sekali lagi dalam hal ini dapat berperan sebagai

mediator guna mempertemukan dan membahas semua pendapat dari semua negara-negara anggota.

